Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

LAPORAN
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK

Balai Bahasa Provinsi Aceh
Tahun 2025

**Jalan T. Panglima Nyak Makam Nomor 21, Kota Baru,
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23125**

082274487449
balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
bbaceh.kemdikbud.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN.....3

BAB II ISI 5

PELAYANAN UKBI 9

PELAYANAN FASILITASI BIPA 14

PELAYANAN REVITALISASI BAHASA DAERAH.....19

PELAYANAN PERKAMUSAN DAN PERISTILAHAN.....22

PELAYANAN PENERJEMAHAN 25

PELAYANAN PENYULUHAN BAHASA DAN HUKUM 28

PELAYANAN LITERASI.....31

PEMBERIAN LAYANAN MELALUI FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN TAHUN 2025.....33

BAB III PENUTUP 34

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan Forum Komunikasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog antara penyelenggara dan pengguna layanan. Forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menampung masukan, saran, serta aspirasi dari masyarakat, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konstruktif.

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus membangun hubungan kemitraan antara instansi dengan masyarakat pengguna layanan. Melalui forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan langsung terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan, mencakup aspek kecepatan, kemudahan, biaya, kompetensi petugas, serta sarana dan prasarana pendukung.

Hasil diskusi dan rekomendasi yang diperoleh dari Forum Komunikasi Publik ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan. Harapannya, pelaksanaan forum ini dapat memperkuat komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan FKP tahun ini dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) di setiap unit atau jenis layanan. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat pengguna, guna memperoleh umpan balik langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga memperkuat komitmen instansi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan adanya dialog terbuka melalui FGD, diharapkan terbangun sinergi yang lebih baik antara penyelenggara dan pengguna layanan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, responsif, dan memuaskan.

Diskusi kelompok terpumpun (FGD) dilakukan oleh para pegawai Balai Bahasa Provinsi Aceh bersama para pengguna layanan dari berbagai latar belakang, seperti guru, dosen, mahasiswa, penerjemah, peneliti, pegiat literasi, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan secara terarah dan partisipatif untuk menggali persepsi, pengalaman, serta harapan masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Melalui FGD, peserta memberikan umpan balik yang berharga terhadap berbagai layanan, meliputi sosialisasi dan pelaksanaan UKBI, fasilitasi BIPA, layanan penerjemahan, revitalisasi bahasa daerah, penyusunan produk leksikografi bahasa daerah, pelatihan komunitas literasi, dan penyuluhan Bahasa Indonesia. Setiap layanan didiskusikan secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan ke depan.

Hasil dari diskusi menunjukkan bahwa secara umum, pengguna layanan merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pegawai Balai Bahasa Provinsi Aceh dinilai ramah, komunikatif, dan profesional dalam melaksanakan tugas. Namun demikian, peserta juga memberikan sejumlah masukan konstruktif, seperti perlunya peningkatan kecepatan layanan digital, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan sistem informasi agar akses terhadap program dan layanan kebahasaan menjadi lebih luas dan mudah.

BAB II ISI

Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki peran penting dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra di wilayah Aceh. Melalui berbagai layanan kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa hadir sebagai mitra masyarakat, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan berbagai pihak lain yang peduli terhadap kemajuan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Salah satu layanan utama Balai Bahasa Provinsi Aceh adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Layanan ini ditujukan bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, maupun warga negara asing untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia secara objektif. Hasil uji berupa sertifikat kemahiran yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan akademik, administratif, dan profesional.

Selain itu, Balai Bahasa juga menyediakan layanan penyuntingan dan penerjemahan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh bantuan profesional untuk memperbaiki atau menerjemahkan berbagai jenis naskah, seperti karya ilmiah, artikel, abstrak, dokumen resmi, dan karya sastra, baik dari maupun ke dalam bahasa Indonesia, Aceh, Inggris, dan Arab. Layanan ini membantu meningkatkan mutu kebahasaan naskah yang akan diterbitkan atau disebarluaskan.

Bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dan instansi yang membutuhkan narasumber atau juri, Balai Bahasa Provinsi Aceh juga menyediakan tenaga ahli kebahasaan dan kesastraan. Para narasumber ini berperan dalam kegiatan seperti pelatihan, lomba, seminar, atau diskusi ilmiah yang berkaitan dengan bahasa dan sastra.

Dalam bidang konsultatif, Balai Bahasa melayani program konsultasi kebahasaan dan kesastraan. Layanan ini terbuka bagi siapa pun yang ingin berkonsultasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pembinaan bahasa daerah, atau pengembangan karya sastra.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, tersedia pula layanan fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Melalui program ini, Balai Bahasa menyediakan tenaga pengajar dan konsultasi kegiatan BIPA untuk lembaga penyelenggara, pengajar, maupun peserta didik asing yang ingin belajar bahasa Indonesia di Aceh.

Balai Bahasa Provinsi Aceh juga memiliki layanan saksi ahli bahasa, yang diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengacara untuk membantu dalam perkara hukum yang berkaitan dengan aspek kebahasaan.

Sebagai pelengkap, masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpustakaan yang menyediakan berbagai koleksi buku, karya ilmiah, dan referensi kebahasaan serta kesastraan. Perpustakaan Balai Bahasa menjadi tempat belajar dan riset bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum yang tertarik pada dunia bahasa dan sastra.

Melalui beragam layanan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh berupaya menghadirkan pelayanan publik yang bermanfaat, edukatif, dan mendukung penguatan budaya literasi di masyarakat Aceh.



Selain layanan-layanan kebahasaan dan kesastraan yang bersifat langsung kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Aceh juga menjalankan berbagai layanan strategis berbasis indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berorientasi pada peningkatan mutu bahasa, sastra, dan literasi di Aceh. Layanan-layanan ini mencerminkan peran Balai Bahasa sebagai pelaksana kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam memperkuat ekosistem kebahasaan di daerah.

Melalui program peningkatan kecakapan literasi membaca, Balai Bahasa Provinsi Aceh berkontribusi dalam menumbuhkan budaya literasi peserta didik di Aceh. Kegiatan ini melibatkan sekolah, guru, dan komunitas literasi untuk meningkatkan kemampuan memahami teks dan mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi penutur bahasa Indonesia, Balai Bahasa menyelenggarakan berbagai kegiatan pengujian, pelatihan, dan pembinaan bahasa bagi pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat umum. Program ini bertujuan agar penutur bahasa Indonesia di Aceh dapat berkomunikasi secara efektif sesuai konteks sosial dan profesionalnya.

Balai Bahasa Provinsi Aceh juga memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi lembaga dan komunitas dalam program kebahasaan dan kesastraan. Melalui pembinaan lembaga dan komunitas penggerak literasi, Balai Bahasa mendorong peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta memperkuat aktivitas literasi berbasis masyarakat.

Dalam bidang pengembangan, Balai Bahasa secara berkelanjutan menghasilkan dan memvalidasi produk-produk kebahasaan dan kesastraan, seperti kamus, glosarium, bahan ajar, dan kajian linguistik. Produk-produk

tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penelitian, pendidikan, dan pelestarian bahasa daerah di Aceh.

Melalui program pelindungan bahasa dan sastra, Balai Bahasa berupaya memetakan, mendokumentasikan, serta memfasilitasi pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah agar tetap hidup di tengah masyarakat. Fasilitasi juga diberikan kepada pengajar bahasa daerah agar penutur muda tetap terhubung dengan warisan bahasanya.

Dalam lingkup internasional, Balai Bahasa Provinsi Aceh turut mendukung program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dengan memfasilitasi lembaga penyelenggara BIPA di dalam negeri. Layanan ini memperkuat peran bahasa Indonesia di kancah global sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia.

Selain itu, dari aspek tata kelola, Balai Bahasa Provinsi Aceh terus berupaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga melalui pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, serta penerapan sistem kinerja yang berorientasi hasil.

Dengan beragam layanan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa kebahasaan, tetapi juga sebagai pusat penggerak literasi, pelindung bahasa daerah, dan penjaga mutu bahasa Indonesia di wilayah Aceh.



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
UKBI
(Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia)







PELAYANAN UKBI

(UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA)

UKBI dikembangkan sebagai tes standar untuk mengukur tingkat Kemahiran berbahasa para penutur bahasa Indonesia. Instrumen ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 023993 dan 023994 tertanggal 8 Januari 2004, yang kemudian diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selain itu, penggunaan UKBI di masyarakat juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

UKBI Adaptif merupakan pengembangan terbaru dari sistem layanan UKBI. Pengembangan ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (KKLP UKBI), dengan sistem pelaksanaan uji yang dilakukan secara daring. Layanan ini ditujukan kepada seluruh penutur bahasa Indonesia, baik penutur asli maupun penutur asing, sehingga UKBI Adaptif Merdeka memiliki jangkauan yang luas dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu keunggulan UKBI Adaptif adalah mekanisme pengujian yang dirancang menyesuaikan tingkat kemampuan peserta. Sistem adaptif memungkinkan setiap peserta memperoleh jumlah soal dan waktu uji yang berbeda.sesuai dengan hasil respons mereka. Misalnya, pada Seksi I Mendengarkan, peserta terlebih dahulu mengerjakan satu teslet berisi lima soal. Jawaban peserta pada teslet awal tersebut akan menentukan tingkat kesulitan teslet berikutnya, apakah lebih mudah, setara, atau lebih sulit. Apabila peserta berada pada jenjang teslet setara secara berturut-turut sebanyak dua kali, sistem akan menghentikan uji secara otomatis. Pada seksi ini, jumlah maksimal teslet yang dapat dikerjakan adalah sembilan, dengan waktu pengerjaan maksimal tiga puluh menit.

Setelah menyelesaikan Seksi I Mendengarkan, peserta secara otomatis diarahkan ke Seksi II Merespons Kaidah dengan pola pengujian yang sama. Pada seksi ini, jumlah maksimal teslet yang dapat dikerjakan peserta adalah lima, dengan alokasi waktu maksimal dua puluh lima menit. Selanjutnya, peserta melanjutkan ke Seksi III Membaca, juga dengan pola yang serupa. Pada seksi ini, jumlah maksimal teslet adalah sembilan dengan waktu maksimal empat puluh lima menit.

Berbeda dengan tiga seksi sebelumnya, pada Seksi IV Menulis dan Seksi V Berbicara, seluruh peserta wajib mengerjakan keseluruhan soal yang disajikan. Masing-masing seksi memuat dua soal yang harus dijawab peserta secara utuh untuk mengukur keterampilan produktif berbahasa Indonesia.



Kegiatan diskusi kelompok terpumpun yang telah dilakukan terkait pelayanan UKBI berupa sosialisasi dan pelaksanaan UKBI Adaptif di Kabupaten Aceh Barat, Kota Langsa, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, pelayanan UKBI juga menyasar kelompok disabilitas, telah dilakukan pendampingan uji coba aplikasi UKBI Adaptif bagi disabilitas rungu di SLB Pembina Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Besar.

Sosialisasi dan pendampingan UKBI dilaksanakan pada:

1) Sosialisasi dan Pelaksanaan UKBI Adaptif tanggal di Kota Langsa;
2) Sosialisasi dan Pelaksanaan UKBI Adaptif tanggal 22—25 September 2025 di Kabupaten Aceh Barat;
3) Sosialisasi dan Pelaksanaan UKBI Adaptif tanggal 7—8 Oktober 2025 di Kabupaten Bireuen dengan Pusat Bahasa Universitas Almuslim;
4) Pendampingan Uji Coba Aplikasi UKBI Adaptif bagi Disabilitas Rungu di SLB Pembina Provinsi Aceh tanggal 8—9 Oktober 2025 di Kabupaten Aceh Besar;
5) Sosialisasi dan Pelaksanaan UKBI Adaptif tanggal 23—24 Oktober 2025 di Kabupaten Bener Meriah;



Kegiatan FGD pelayanan UKBI yang telah dilakukan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pelayanan UKBI di berbagai wilayah. Melalui kegiatan ini, diperoleh berbagai pandangan dan saran dari peserta yang terdiri atas guru, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta peserta dari kalangan umum. Secara umum, peserta memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan UKBI Adaptif yang dinilai semakin mudah diakses, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia di berbagai kalangan.

Selain itu, hasil diskusi juga menyoroti beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pelayanan, antara lain perlunya perluasan jangkauan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil, peningkatan kapasitas teknis petugas pelaksana, serta penguatan infrastruktur jaringan internet untuk mendukung pelaksanaan UKBI Adaptif secara daring.

Sementara itu, pendampingan uji coba aplikasi UKBI Adaptif bagi penyandang disabilitas rungu di SLB Pembina Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam upaya mewujudkan layanan UKBI yang inklusif. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan teknis dan kebutuhan khusus yang perlu disesuaikan agar UKBI benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, FGD pelayanan UKBI ini menjadi sarana strategis untuk menampung aspirasi pengguna layanan sekaligus memperkuat sinergi antara Balai Bahasa Provinsi Aceh, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan, dan inklusivitas layanan UKBI di seluruh wilayah Aceh.





Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
FASILITASI BIPA
(Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)







PELAYANAN FASILITASI BIPA

Peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) pun semakin marak dilaksanakan, baik di sentra-sentra BIPA dalam negeri maupun sentra-sentra di luar negeri. Hal ini menjadi pertanda kebangkitan Indonesia dalam segi budaya, sosial, dan ekonomi di kancah internasional untuk lebih dikenal, bersaing, dan bersanding dengan negara-negara lain. Kenyataan itu menyebabkan semakin banyaknya orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan, baik tujuan politik, perdagangan, seni dan budaya, maupun wisata. Perkembangan ini memberi peluang bagi lembaga-lembaga pendidikan maupun perorangan untuk mengambil bagian sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Kantor/balai bahasa yang ada di setiap provinsi merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengoordinasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan program BIPA di daerah. Di wilayah Aceh, Balai Bahasa Provinsi Aceh melalui KKLP BIPA telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ke-BIPA-an di daerah Aceh, sehingga Asosiasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) dibentuk pada September tahun lalu sebagai wadah kolaborasi dan penguatan kapasitas pengajar BIPA di Aceh. Namun, berdasarkan implementasinya, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan modul ajar yang kontekstual dengan budaya Aceh, serta kurangnya kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.

Melihat tantangan tersebut, audiensi dengan pemangku kebijakan di kampus serta pendampingan terhadap APPBIPA Aceh menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengajaran BIPA di Aceh. Hal ini bertujuan memperkuat kapasitas lembaga dalam perancangan kurikulum, pelatihan pengajar, penyusunan materi ajar berbasis budaya lokal, serta perluasan jaringan kerja sama baik nasional maupun internasional.

Kegiatan FGD yang telah dilakukan terkait pelayanan fasilitasi BIPA berupa audiensi dan pendampingan BIPA, bimtek pengajaran BIPA dasar bagi dosen dan pegiat BIPA, penyelenggaraan webinar ke-BIPA-AN, pembinaan asosiasi APPBIPA, serta perjanjian kerja sama terkait BIPA. Kegiatan ini melibatkan lembaga (kampus-kampus) di Provinsi Aceh, di antaranya Politeknik Negeri Lhokseumawe, Universitas Almuslim, UIN Ar-Raniry Aceh, ISBI Aceh, Universitas Samudera, Universitas Malikussaleh, UIN Sultanah Nahrasiyah, IAIN Langsa, dan Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Muhammadiyah Mahakarya.

Kegiatan fasilitasi BIPA yang telah dilakukan di tahun 2025, di antaranya:

1) Audiensi dan Pendampingan BIPA di Kota Lhokseumawe tanggal 19 Maret 2025;
2) Bimtek Pengajaran BIPA bagi Dosen dan Pegiat BIPA tanggal 8—11 Juli 2025 di Kota Lhokseumawe;

3) Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa universitas di Provinsi Aceh, yaitu Politeknik Negeri Lhokseumawe, Universitas Almuslim, UIN Ar-Raniry Aceh, dan ISBI Aceh;
4) Webinar ke-BIPA-an telah dilaksanakan secara daring dengan tema "Inovasi Pengajaran BIPA pada Era 5.0" dan "Mengenal SKKNI BIPA: Langkah Awal menjadi Pengajar BIPA Profesional".





Kegiatan FGD pelayanan fasilitasi BIPA yang telah dilaksanakan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Balai Bahasa Provinsi Aceh dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan dan memperluas pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di wilayah Aceh. Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan seperti audiensi, pendampingan, bimbingan teknis, webinar, dan pembinaan asosiasi APPBIPA, diperoleh berbagai masukan serta rekomendasi yang berharga untuk meningkatkan mutu dan efektivitas program BIPA di daerah.

Peserta FGD memberikan tanggapan positif terhadap langkah Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai kegiatan ke-BIPA-an, terutama dalam hal penguatan kapasitas pengajar dan peningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa catatan penting yang muncul dari diskusi antara lain perlunya peningkatan kompetensi pengajar BIPA melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan modul ajar yang kontekstual dengan budaya lokal Aceh, serta perluasan jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri sebagai mitra pelaksana program BIPA.

Selain itu, kegiatan webinar ke-BIPA-an yang diselenggarakan secara daring mendapat antusiasme tinggi dari peserta, baik dari kalangan dosen, pegiat bahasa, maupun mahasiswa. Webinar tersebut menjadi sarana berbagi praktik baik dan memperkenalkan konsep serta standar kompetensi kerja nasional di bidang BIPA. Sementara itu, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan beberapa universitas di Provinsi Aceh menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan BIPA dan memastikan keberlanjutan program di tingkat perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, FGD pelayanan fasilitasi BIPA yang telah dilakukan pada tahun 2025 ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekosistem pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di Aceh. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan program lanjutan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat kegiatan BIPA di wilayah barat Indonesia.


Webinar BIPA Seri 2
INOVASI
PENGAJARAN BIPA
PADA ERA 5.0
PIDATO SAMBUTAN
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Aceh
NARASUMBER I
Agus Soehardjono, S.S., M.M.
Wakil Ketua I APPBIPA Pusat
NARASUMBER II
Dr. Wira Kurniawati, M.A.
Pengajar BIPA dan
Koordinator INCULS UGM
KAMIS
28 NOVEMBER 2024
08.30--12.30 WIB
ZOOM MEETING
https://s.id/bipa5titik2
GRATIS E-SERTIFIKAT
MODERATOR
Novita Maharani, S.S.
Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat
bbaceh.kemdikbud.go.id
BBhsAceh
balaibahasa.aceh
Balai Bahasa Provinsi Aceh


#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
RAMAH
BANGGA, MAHIR, DAN MAJU BERBAHASA INDONESIA
BerAKHLAK
WEBINAR KEBIPAAN
MENGENAL SKKNI BIPA: LANGKAH AWAL
MENJADI PENGAJAR BIPA PROFESIONAL
NARASUMBER
Agus Soeharjono, S.S., M.M.
NARASUMBER
Dr. Nuny Sulistiany Idris, M.Pd.
KEPALA BBPA
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
RABU,
29 OKTOBER 2025
8:00-13:30 WIB
ZOOM MEETING
ID RAPAT: 830 4335 2549
KATA SANDI: BIPA2025
MODERATOR
Muhammad Riyan Maulana
GRATIS SERTIFIKAT 5 JP
Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat
bbaceh.kemendikdasmen.go.id
BBhsAceh
balaibahasa.aceh
Balai Bahasa Provinsi Aceh

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
REVITALISASI BAHASA DAERAH







PELAYANAN REVITALISASI BAHASA DAERAH

Menurut UNESCO, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, telah ada 200 bahasa daerah di dunia yang punah. Sedangkan di lndonesia, dari 718 bahasa daerah di lndonesia, sebagian besar kondisinya terancam punah dan kritis. Ada berbagai faktor penyebab terancam punah dan kritisnya bahasa daerah, di antaranya: 1) Sikap penutur bahasa daerah terhadap bahasanya; 2) Migrasi atau mobilitas so6ial yang tinggi; 3) Perkawinan dengan pasangan yang berbeda bahasa; dan 4) Bencana yang menyebabkan berkurangnya penutur bahasa daerah.

Berdasarkan kajian vitalitas yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Aceh pada tahun 2019 terhadap bahasa Gayo dan mengamati fenomena yang teljadi pada penutur bahasa Aceh, disimpulkan bahwa bahasa Gayo dan bahasa Aceh dalam status rentan. Karena itu, perlu dilakukan upaya]evitalisasi terhadap bahasa Gayo dan bahasa Aceh.

Bertolak dari uraian di atas, tahun 2025 Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan revitalisasi bahasa daerah (RBD) di enam kabupaten. Untuk RBD bahasa Aceh dilaksanakan di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, sedangkan RBD bahasa Gayo dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meraah, dan Kabupaten Gayo Lues.

Sebelum pelaksanaan RBD Aceh, Balai Bahasa Provinsi Aceh terlebih dahulu melakukan audiensi atau koordinasi dengan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota yang menjadi tempat sasaran revitalisasi. Pada tahun 2023 kegiatan koordinasi sudah pernah dilakukan di Kabupaten yang mayoritas menjadi tempat penutur bahasa Gayo, kemudian tahun 2024 kegiatan koordinasi hanya dilakukan di Kabupaten/Kota yang menjadi tempat revitalisasi bahasa daerah Aceh, yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan tahun 2025, kegiatan koordinasi dilakukan di Kabupaten/Kota yang menjadi tempat revitalisasi bahasa daerah Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Bireuen.



Setelah pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Bireuen, tahapan berikutnya adalah Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) Aceh. Pada Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) Aceh ini para peserta mendapat penjelasan terkait materi dari para narasumber/maestro. Pengetahuan yang didapatkan para guru utama kemudian dijadikan sebagai acuan untuk pengajaran/pengimbasan kepada guru-guru di sekolah dan para siswa (tunas bahasa ibu).

Tahapan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah yang telah dilakukan adalah:

1) Koordinasi antarinstansi Revitalisasi Bahasa Aceh di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Barat.
2) Bimtek Guru Utama dilaksanakan secara daring dan luring. Bimtek Guru Utama dilaksanakan secara luring di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Bener Meriah. Bimtek Guru Utama dilakukan secara daring di Kabupaten Aceh Besar, Kabuaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues.





Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
PERKAMUSAN
DAN PERISTILAHAN







PELAYANAN PERKAMUSAN DAN PERISTILAHAN

Upaya pengembangan bahasa Indonesia dilakukan melalui peningkatan daya ungkap bahasa Indonesia. Peningkatan daya ungkap dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dilakukan melalui penjaringan leksikon bahasa-bahasa daerah yang sangat banyak, kaya, dan beragam. Pengayaan kosakata bahasa Indonesia melalui leksikon bahasa daerah akan lebih memperlihatkan salah satu ciri lain bahasa Indonesia, yaitu sarat dengan unsur bahasa-bahasa daerah yang kaya.

Bahasa daerah adalah sumber pengayaan bahasa Indonesia, selain bahasa asing. Melalui bahasa daerah leksikon bahasa Indonesia diperkaya, leksikon yang kaya akan meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia. Pengayaan leksikon dari bahasa daerah bisa dari mana saja termasuk dari segi budaya seperti kekerabatan, kuliner, dan adat-istiadat. Kekayaan flora dan fauna, seperti penambahan flora dan fauna endemik Indonesia atau temuan orang Indonesia.

Pemerkayaan leksikon bahasa Indonesia melalui taman sari bahasa daerah dilakukan secara terencana dan sistematis melalui tiga kegiatan: a) Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah, b) Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah, dan c) Sidang Komisi Bahasa Daerah.

Tahap pertama kegiatan yang telah dilakukan adalah Inventarisasi Kosakata Bahasa Gayo di tiga wilayah Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan pada triwulan 1 dan 2 tahun 2025. Ketiga kabupaten tersebut merupakan wilayah dengan mayoritas penutur berbahasa Gayo. Sementara itu, untuk menambah data kosakata bahasa Gayo dilakukan pencarian kosakata dengan mewawancarai penutur bahasa Gayo yang tinggal di Kota Banda Aceh.

Tahap kedua kegiatan yang telah dilakukan adalah Lokakarya Kosakata Bahasa Gayo. Kegiatan ini berupa validasi kosakata yang telah didapatkan dari data lapangan dan studi pustaka. Kegiatan ini melibatkan peserta yang sebelumnya menjadi narasumber dalam kegiatan inventarisasi kosakata bahasa Gayo, serta melibatkan akademisi kebahasaan yang juga sebagai penutur bahasa Gayo. Kegiatan lokakarya dilaksanakan pada 19–-21 Agustus 2025 di Hotel Renggali, Aceh Tengah.

Tahap ketiga kegiatan yang telah dilakukan adalah Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD). Ini merupakan rangkaian terakhir dari proses pengusulan kosakata bahasa daerah menjadi kosakata yang dimuat dalam KBBI. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memeriksa dan memberi umpan balik atas hasil verifikasi kosakata hasil inventarisasi dalam lokakarya. Keluaran dari kegiatan ini adalah daftar usulan entri ke KBBI Daring dan senarai calon istilah sebagai alternatif padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia.

Salah satu upaya pendokumentasian kosakata bahasa daerah adalah melalui penyusunan kamus bahasa daerah. Kamus bahasa daerah berfungsi sebagai media informasi nilai-nilai kultur suatu masyarakat. Setiap tahunnya, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia melalui bahasa daerah dan penyusunan produk leksikografi bahasa daerah. Di

tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Aceh melakukan penyusunan kamus yang berjudul Kamus Kopi Gayo-Indonesia.Balai Bahasa Provinsi Aceh juga memiliki kamus digital KBDA Daring, dengan alamat: kamusbbpa.kemdikbud.go.id. Kamus digital ini memuat kosakata bahasa daerah di Provinsi Aceh. Laman tersebut telah diresmikan sejak tahun 2021. Kamus digital ini bersifat jangka panjang dan senantiasa diperbaharui.





Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
PENERJEMAHAN







PELAYANAN PENERJEMAHAN

Kegiatan penulisan dan penerjemahan cerita anak merupakan salah satu ikhtiar penting dalam melestarikan bahasa daerah sekaligus menghadirkan bahan bacaan yang bermutu bagi anak-anak. Cerita anak bukan sekadar hiburan, tetapi juga wahana pendidikan, pembentukan karakter, serta pengantar anak mengenal nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakatnya. Melalui cerita, anak dapat belajar memahami lingkungannya, menyerap kosakata baru, dan membangun daya imajinasi serta kreativitas yang menjadi bekal penting dalam kehidupannya kelak.



Namun, dalam praktik penulisan cerita anak selama ini, masih ditemukan sejumlah kelemahan mendasar yang perlu segera dibenahi. Salah satunya ialah kecenderungan penulis untuk lebih dulu menulis dalam bahasa Indonesia, baru kemudian menerjemahkannya ke bahasa daerah. Pola seperti ini sering berujung pada hilangnya ruh bahasa daerah karena penulis lebih menempuh cara penerjemahan word to word yang kaku dan kurang enak dibaca. Akibatnya, cerita yang dihasilkan menjadi terasa artifisial, jauh dari rasa asli bahasa daerah, dan tidak mampu menghadirkan pengalaman linguistik yang utuh bagi pembaca cilik. Padahal, semestinya naskah lahir terlebih dahulu dari bahasa daerah dengan kekayaan kosakata, ungkapan khas, serta gaya bertutur alami masyarakat penutur jati, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara komunikatif.

Kelemahan lain juga terlihat dari sisi teknik penulisan. Banyak naskah belum mampu menghadirkan orientasi atau pembuka cerita yang kuat sehingga gagal “menyentak” pembaca sejak awal. Alur yang dibangun sering kali datar, kurang dramatis, dan tidak menimbulkan ketegangan yang sehat dalam jalan cerita. Konflik tidak jarang berakhir dengan resolusi yang lemah, sehingga kesan cerita menjadi kurang imbang. Dari sisi bahasa, penggunaan diksi dan gaya penulisan

kadang masih terlalu kaku, belum kiddy, dan belum sepenuhnya akrab dengan dunia anak. Di sisi lain, muatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang semestinya bisa dihadirkan secara ringan dan menyenangkan, sering kali dituliskan terlalu teknis sehingga justru mengurangi daya imajinasi cerita.

Melihat kenyataan tersebut, perlu adanya suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas penulis melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan dan Penerjemahan Cerita Anak. Bimtek ini dirancang bukan hanya untuk memperkuat keterampilan teknis penulisan, melainkan juga membangun kesadaran penulis agar menghargai bahasa daerah sebagai sumber utama inspirasi. Melalui kegiatan ini, penulis akan dibekali pemahaman mendalam mengenai bagaimana menyerap kekayaan kosakata, ungkapan, dan gaya bertutur khas masyarakat lokal, lalu mengemasnya dalam bentuk cerita yang segar, komunikatif, dan menarik bagi anak-anak. Selain itu, penulis juga akan dilatih agar mampu menerjemahkan karya ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang tepat, yakni menghadirkan makna, rasa, dan nuansa, bukan sekadar menerjemahkan kata per kata.

Dengan demikian, Bimtek ini diharapkan dapat menghasilkan penulis-penulis yang lebih terampil, kreatif, dan peka terhadap dunia anak. Naskah yang lahir tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, memelihara bahasa daerah, dan menjadi sarana literasi yang menjembatani antara lokalitas dengan kebangsaan. Pada akhirnya, kegiatan ini akan memperkuat ekosistem literasi anak di Aceh dan mendorong hadirnya karya-karya bermutu yang dapat dibaca, dinikmati, dan dibanggakan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Karya Berbahasa Daerah akan dilaksanakan di Hotel Grand Arabia Banda Aceh pada tanggal 17--20 September 2025



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
PENYULUHAN
BAHASA DAN HUKUM







PELAYANAN PENYULUHAN BAHASA DAN HUKUM

Peningkatan Kemahiran Berbahasa: Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional. Peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, perlu dilakukan secara terarah dan terencana untuk mendukung upaya pembakuan bahasa. Salah satu bentuk peningkatan mutu ini adalah pembakuan ragam tulis bahasa Indonesia melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan terkait surat-menyurat, penulisan laporan teknis, penyusunan risalah rapat, pengumuman, dan pencatatan peristiwa penting. Semua kegiatan tersebut memerlukan kemampuan berbahasa yang andal agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, jelas, dan lugas.

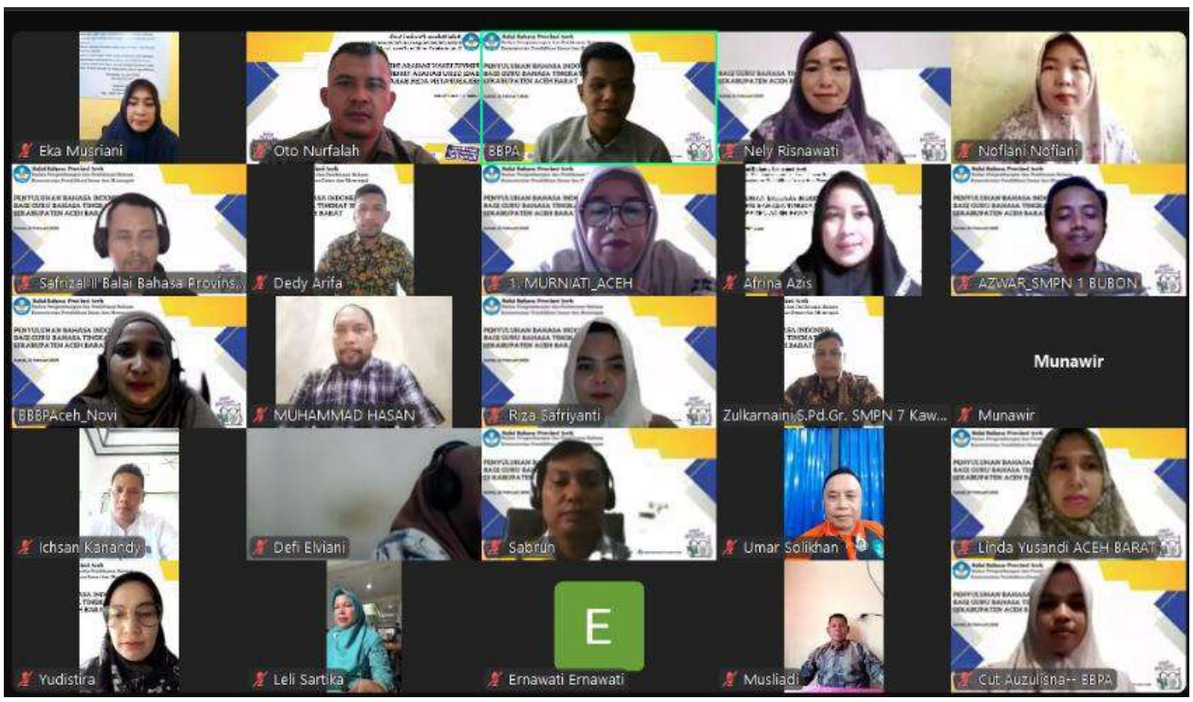
Penyuluhan bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan keterampilan peserta, terutama dalam penggunaan ragam tulis. Peserta penyuluhan, yang umumnya adalah guru bahasa dan guru nonbahasa. Para peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun instansi tempat mereka bekerja. Untuk mencapai tujuan ini, penyuluhan meliputi Pengenalan dan pemahaman kaidah bahasa Indsonesia, seperti:

1) kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD),
2) kaidah pembentukan istilah,
3) kaidah penyusunan kalimat dan paragraf,
4) kaidah pembentukan dan pemilihan kata,
5) dasar-dasar penulisan surat, pernalaran, dan penulisan laporan.



Kegiatan penyuluhan bahasa dan hukum yang telah dilakukan, di antaranya:

1) Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia: Pnyuluhan Bahasa Indonesia Se-Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15—17 Juli 2025
2) Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia: Pnyuluhan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Administrasi Tingkat SD dan SMP Se-Kabupaten Gayo Lues tanggal 12—14 Agustus 2025
3) Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia: Pnyuluhan Bahasa Indonesia yang dilakukan secara daring Se-Kabupaten Aceh Barat.



Selain kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa dalam ranah hukum, Balai bahasa Provinsi Aceh juga mengadakan kegiatan festival musikalisasi puisi sebagai salah satu upaya meningkatkan apresiasi masyarakat, khususnya pelajar, remaja, dan generasi muda terhadap sastra, khususnya puisi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PELAYANAN
LITERASI







PELAYANAN LITERASI

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2020--2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam renstra tersebut ditunjukkan adanya dua sasaran strategis BPP Bahasa, yaitu (1) meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan serta (2) meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan,

riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sasaran strategis yang pertama mempunyai dua indikator kinerja, yaitu Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Salah satu sasaran kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan yang ditunjukkan oleh dua indikator: (1) jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat; dan (2) jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan.

Kesuksesan GLN tentu saja memerlukan dukungan berbagai pihak terutama kelompok masyarakat (komunitas) yang bergerak aktif dalam mengembangkan berbagai kegiatan literasi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan Pelatihan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Balai Bahasa Provinsi Aceh

PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

MELALUI FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN TAHUN 2025



PEMBERIAN LAYANAN MELALUI FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN TAHUN 2025

No	Nama Pemberi Layanan	Nama Kegiatan/Layanan	Kategori Layanan	Tanggal
1	Cut Ida Agustina	Penerjemahan data sengketa pemilukada Aceh Timur di MK	Penerjemahan	27 Januari 2025
2	Zainun	Lomba Pidato Bahasa Aceh dalam Rangka Festival Jeumpa Puteh di SMAN 1 Banda Aceh	Juri	8 Februari 2025
3	Syarifah Zurriyati	Permintaan saksi ahli bahasa dari Polres Sabang	Saksi Ahli	
4	Cut Ida Agustina	Seminar dan Peluncuran kamus bahasa Simolol di Sinabang	Narasumber	24 Mei 2025
5	Baun Thoib SS	Dialog Pagi RRI Banda Aceh (Menumbuhkan Budaya Literasi: Peran Komunitas dan Pemerintah)	Narasumber	19 Mei 2025
6	Baun Thoib SS	Bincang Literasi Forum TBM Aceh: Sosialisasi Banpem untuk komunitas Literasi	Narasumber	3 Juni 2025
7	Yanti Zulita	Bimtek Literasi Bahasa, Peningkatan Keterampilan Komunikasi Lisan dan Tulisan	Narasumber	24 Juni 2025
8	Adnan A. Nasution, S.S.	Sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh	Narasumber	15 Mei 2025
9	Sabrun Jamil Tanjung dan Safrizal	Sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh di Dinas Kesehatan Aceh	Narasumber	17 Juni 2025
12	Atikah Adoria	Workshop Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)	Narasumber	22 Agustus 2025
11	Cut Ida Agustina	Badan Informasi Geospasial (BIG): Sengketa 4 Pulau Aceh	Narasumber	2 September 2025
12	Ibrahim Sembiring	FGD RBD Disbudpar Aceh	Pembahas	2 Oktober 2025

BAB III PENUTUP

Sebagai unit pelaksana teknis di bidang kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi Aceh senantiasa berupaya menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui Forum Komunikasi Publik ini, Balai Bahasa membuka ruang dialog dan partisipasi aktif antara penyelenggara layanan dan para pengguna layanan, baik dari unsur instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat umum. Pertemuan ini menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan jenis-jenis layanan Balai Bahasa Provinsi Aceh sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa serta sastra di wilayah Aceh.

Berbagai masukan dan tanggapan yang diperoleh dalam forum ini menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian yang besar dari masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Saran-saran yang disampaikan, baik terkait efektivitas layanan, perluasan jangkauan, maupun penguatan inovasi program, menjadi dasar bagi Balai Bahasa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kompetensi penutur bahasa Indonesia, penguatan literasi membaca, serta pelestarian bahasa dan sastra daerah.

Melalui pelaksanaan forum ini, Balai Bahasa Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalitas, responsivitas, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan publik. Diharapkan, hasil komunikasi dan sinergi yang terbangun dalam forum ini dapat memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang literat, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta tetap mencintai bahasa dan sastra daerahnya. Dengan demikian, Balai Bahasa Provinsi Aceh akan terus hadir sebagai garda terdepan dalam membangun ekosistem kebahasaan dan kesastraan yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober 2025

Mengetahui,

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

NIP 196808081998021001